



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**

**(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2011-2012
Masa Persidangan : IV
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : 1. Direktur Utama PT. Askes (Persero);
2. Direktur Utama PT. Jamsostek (Persero).
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Rabu, 30 Mei 2012
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Acara : 1. Membicarakan proses pengalihan program jaminan kesehatan
terkait dengan operasional BPJS Kesehatan Tahun 2011.
2. Lain-lain.
Ketua Rapat : Ir. Soepriyatno/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Anggota : 30 orang dari 51 Anggota, 7 orang izin.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direktur Utama PT. Askes (Persero) dan Direktur Utama PT. Jamsostek (Persero) dibuka pukul 10.25 WIB, setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendorong PT. Askes (Persero) dan PT. Jamsostek (Persero) untuk melakukan pengkajian substansi materi terkait dengan Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran, Rancangan Perpres Pentahapan Kepesertaan serta Rancangan Perpres tentang Direksi dan Komisaris PT. Askes (Persero) dan PT. Jamsostek (Persero)

- b. Memperluas target cakupan kepesertaan program jaminan sosial, khususnya jaminan kesehatan sehingga tercapai *universal coverage* tahun 2014.
 - c. Perluasan kepesertaan program jaminan kesehatan dan pengalihan program jaminan pemeliharaan kesehatan Jamsostek kepada BPJS Kesehatan.
 - d. Membuat Proyeksi kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3. Komisi IX DPR meminta PT. Askes (Persero) agar berkonsentrasi untuk melaksanakan BPJS Kesehatan dan meleburkan PT. Inhealth kembali kepada PT. Askes (Persero) sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS.
 4. Komisi IX DPR RI akan membuat Panja Gabungan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS untuk mendorong terlaksananya Sistem Jaminan Sosial Nasional sesuai roadmap implementasi UU BPJS.
 5. Komisi IX DPR RI akan mengadakan Rapat Kerja khusus dengan Menteri Keuangan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Menteri Negara Bappenas, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri BUMN RI untuk mengetahui sejauhmana persiapan pelaksanaan operasionalisasi BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014 dan operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan per 1 Juli 2015.
 6. Komisi IX DPR RI meminta PT. Askes (Persero) dan PT. Jamsostek (Persero) untuk mempertimbangkan rekrutmen tenaga verifikator independen Jamkesmas.
 7. Komisi IX DPR RI meminta PT. Askes (Persero) dan PT. Jamsostek (Persero) menyampaikan hasil-hasil Workshop I, II dan III Koordinasi yang telah dilakukan antara PT. Askes dan PT. Jamsostek paling lambat 18 Juni 2012

Rapat diakhiri pukul 13.55 WIB.

Jakarta, 30 Mei 2012
PIMPINAN KOMISI IX
WAKIL KETUA,



Ir. SOEPRİYATNO